



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 71 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/399/M.KT.01/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Penataan Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1066);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 692), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
- b. Nomor PM 76 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Wilayah Kerja adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang membawahinya.
- (3) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada wilayah kerjanya.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Jumlah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lokasi, terdiri atas:
 - a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sebanyak 9 (sembilan) lokasi;
 - b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II sebanyak 18 (delapan belas) lokasi;
 - c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III sebanyak 17 (tujuh belas) lokasi; dan
 - d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lokasi.
 - (2) Nama kantor, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 942

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 71 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36
TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN

DAFTAR NAMA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN,
LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

A. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I (Eselon II.b)
(Jumlah 9 lokasi)

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai	Dumai, Riau	1) Lubuk Gaung 2) Pelintung 3) Batu Panjang 4) Darul Aman 5) Tanjung Kapal 6) Gunap 7) Selat Morong
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang	Panjang, Lampung	1) Sebalang 2) Rangai 3) Teluk Betung 4) Ketapang Padang Cermin 5) Legundi
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten	Banten, Banten	Terate

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas	Semarang, Jawa Tengah	Kendal
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Sungai Putting
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	Semayang, Kalimantan Timur	Mentawir
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun	Karimun, Kep. Riau	1) Pasir Panjang 2) Pulau Buru 3) Pulau Sambu 4) Tanjung Batu Kundur 5) Pulau Bulan 6) Pulau Jangkat 7) Pulau Nipah 8) Moro 9) Penyalai 10) Sekumbang 11) Tanjung Berlian 12) Pulau Durai
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon	Ambon, Maluku	-
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong	Sorong, Papua Barat	1) Kalobo 2) Makbon 3) Mega 4) Tanjung Kasuari 5) Saoka 6) Kawasan Arar 7) Seget 8) Sele

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
			9) Salawati 10) Sausapor

B. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II (Eselon III.a)
(Jumlah 18 lokasi)

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang	Tanjung Pinang, Kep. Riau	1) Dompok 2) Pangkil 3) Tanjung Mochoh
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur	Padang, Sumatera Barat	1) Air Bangis 2) Tiku 3) Sasak 4) Pariaman 5) Carocok Terusan 6) Carocok Painan 7) Panasahan Painan 8) Bungus 9) Muara Padang
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton	Bengkalis, Riau	1) Bukit Batu 2) Lubuk Muda 3) Sungai Pakning 4) Sungai Apit 5) Bandul 6) Belitung
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang	Palembang, Sumatera Selatan	1) Tanjung Api-Api 2) Prambatan 3) Sungai Lilin 4) Karang Agung 5) Gandus 6) Jakabaring

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
			7) Musi Rawas
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	Cirebon, Jawa Barat	1) Kejawanan 2) Bondet 3) Astanajapura 4) Gebang Mekar
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban	Subang, Jawa Barat	1) Blanakan 2) Mayangan 3) Muara Ciasem 4) Pamanukan 5) Ciparage 6) Sungai Buntu 7) Muara Bendera 8) Muara Gembong
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap	Cilacap, Jawa Tengah	Bunton
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik	Gresik, Jawa Timur	Ujung Pangkah
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bena	Denpasar, Bali	1) Serangan 2) Tanjung Bena 3) Kedonganan 4) Sanur
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak	Pontianak, Kalimantan Barat	1) Mempawah 2) Sungai Kakap 3) Teluk Pakedai 4) Kubu
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	1) Mahakam Hulu 2) Sanga-sanga 3) Muara Berau
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang	Bontang, Kalimantan Timur	-

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung	Bitung, Sulawesi Utara	Kema
14.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu	Palu, Sulawesi Tengah	1) Wani 2) Donggala 3) Labuan 4) Dalaka 5) Toaya 6) Masaingi 7) Tibo 8) Batusuya 9) Alindau 10) Tompe 11) Sibayu 12) Loli Oge 13) Surumana
15.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari	Kendari, Sulawesi Tenggara	1) Soropia 2) Tinanggea 3) Sawa 4) Wawatu
16.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau	Baubau, Sulawesi Tenggara	1) Banabungi Pasarwajo 2) Talaga Raya 3) Sikeli 4) Lasalimu 5) Batu Atas 6) Liana Banggai 7) Lawele 8) Kadatua 9) Siompu 10) Wamengkoli
17.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II	Ternate, Maluku Utara	1) Sulamadah 2) Hiri

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Ternate		3) Tifure 4) Mayau 5) Moti
18.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura	Jayapura, Papua	1) Demta 2) Depapre 3) Muara Tami 4) Holtekam

C. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (Eselon III.b)
(Jumlah 17 lokasi)

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung	Batubara, Sumatera Utara	1) Medang Deras 2) Pangkalan Dodek 3) Desa Lalang 4) Tanjung Tiram
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	1) Siak Sri Indrapura 2) Buatan
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang	Bintan, Kepulauan Riau	1) Kawal 2) Numbing
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku	Muaro Jambi, Jambi	-
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai	Bengkulu, Bengkulu	1) Ketahum 2) Muko-Muko 3) Pulau Tikus
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Pantai Mutiara

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi	Banyuwangi, Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pulau Tabuhan 2) Ketapang 3) Muncar 4) Blimbing Sari 5) Pancer 6) Grajagan 7) Boom 8) Puger
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar	Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jeranjang 2) Teluk Sepi 3) Labuhan Poh-Sekotong 4) Teluk Awang
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelabuhan Tenau 2) Nunbaun Sabu 3) Kolbano 4) Semau 5) Sulamu 6) Boking
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kuala Kuayan 2) Parenggean 3) Samuda 4) Pegatan Mendawai 5) Sungai Sebangau
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin	Kotabaru, Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sebuku 2) Tanjung Batu 3) Gunung Batu Besar 4) Sungai Dua 5) Setangga

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
			6) Serongga 7) Matasiri 8) Marabatuan
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan	Tarakan, Kalimantan Utara	1) Malinau 2) Bangkudulis 3) Bebatu 4) Sesayap
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado	Manado, Sulawesi Utara	1) Tumumpa 2) Tanah Wangko 3) Wori
14.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pare-Pare	Parepare, Sulawesi Selatan	Marabombang
15.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo	Gorontalo, Gorontalo	Kabila Bone
16.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo	Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur	1) Komodo 2) Rinca 3) Bari 4) Nangalili
17.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Biak	Biak Numfor, Papua	1) Bosnik 2) Wardo

D. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV (Eselon IV.a)
(Jumlah 49 lokasi)

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sabang	Sabang, Aceh	Balongan

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa	Langsa, Aceh	1) Idi 2) Kuala Beukah
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh	Aceh Barat, Aceh	Kuala Bubon
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhoksumawe	Aceh Utara, Aceh	-
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Malahayati	Banda Aceh, Aceh	1) Pulo Aceh 2) Lhoknga 3) Sigli
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu	Langkat, Sumatera Utara	1) Pangkalan Brandan 2) Tanjung Pura 3) Kuala Serapuh 4) Tapak Kuda/ Jaringan Halus 5) Pulau Kampai 6) Pulau Sembilan
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga	Sibolga, Sumatera Utara	-
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan	Asahan, Sumatera Utara	Bagan Asahan
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gunung Sitoli	Gunung Sitoli, Sumatera Utara	-
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Cinaku	Indragiri Hulu, Riau	-

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagan Siapi-api	Rokan Hilir, Riau	Sinaboi
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis	Bengkalis, Riau	1) Teluk Pambang 2) Bantan Tengah
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Enok	Indragiri Hilir, Riau	Muara Bakong
14.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan	Indragiri Hilir, Riau	-
15.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selat Panjang	Kepulauan Meranti, Riau	1) Tanjung Samak 2) Tanjung Kedabu
16.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Tungkal	Tanjung Jabung Barat, Jambi	Kuala Betara
17.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Sabak	Tanjung Jabung, Jambi	-
18.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam	Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung	1) Belinyu 2) Sungai Liat 3) Sei Selan
19.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan	Belitung, Bangka Belitung	1) Tanjung Batu 2) Tanjung Roe
20.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok	Bangka Barat, Bangka Belitung	Tanjung Ular
21.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bakauheni	Lampung Selatan, Lampung	1) Kalianda 2) Ketapang 3) Muara Piluk 4) Kampung Sumur

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
22.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu, DKI Jakarta	1) Untung Jawa 2) Pulau Lacang 3) Pulau Tidung 4) Pulau Pramuka 5) Pulau Kelapa
23.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda	Jakarta Utara, DKI Jakarta	1) Tarumajaya 2) Tarumanegara 3) Marunda Centre 4) Muara Tawar
24.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Muara Kamal
25.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo	Probolinggo, Jawa Timur	1) Kalibuntu 2) Paiton 3) Pasuruan 4) Lekok 5) Sendang Biru 6) Prigi 7) Grati
26.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal	Tegal, Jawa Tengah	1) Jongor Tegalsari 2) Larangan 3) Pekalongan 4) Wiradesa 5) Pemalang 6) Brebes 7) Losari
27.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget	Sumenep, Jawa Timur	1) Pasongsongan 2) Ambunten 3) Pragaan 4) Giligenting 5) Tanjung Saronggi 6) Pagerbatu 7) Dungkek
28.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan	Situbondo, Jawa Timur	1) Pasir Putih 2) Besuki 3) Kalbut 4) Jangkar

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
			5) Meimbo
29.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai	Karangasem, Bali	1) Manggis 2) Amed 3) Kubu 4) Tanah Ampo 5) Pesinggahan
30.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Celukan Bawang	Buleleng, Bali	1) Pegametan 2) Brombong 3) Buleleng 4) Pemaron 5) Lovina 6) Sangsit
31.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas	Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	1) Pulau Moyo 2) Teluk Santong 3) Pelabuhan Jambu 4) Prenang
32.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima	Bima, Nusa Tenggara Barat	-
33.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Laurentius Say	Sikka Maumere, Nusa Tenggara Timur	1) Wuring 2) Pemana 3) Sukun 4) Palue 5) Kawapante
34.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende	Ende, Nusa Tenggara Timur	1) Pulau Ende 2) Maurole 3) Ropa
35.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalabahi	Alor, Nusa Tenggara Timur	1) Maritaing 2) Moru 3) Alor Kecil
36.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV	Sumba Timur, Nusa Tenggara	1) Baing 2) Pulau Salura

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Waingapu	Timur	3) Katundu 4) Melolong
37.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete	Sambas, Kalimantan Barat	1) Tambelan 2) Sambas 3) Singkawang 4) Pemangkat 5) Sungai Duri
38.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang	Ketapang, Kalimantan Barat	1) Satong 2) Pesaguan 3) Pasar Sentap
39.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Bun	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	-
40.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pulang Pisau	Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	1) Batanjung 2) Bukit Pinang
41.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sukamara	Sukamara, Kalimantan Tengah	1) Kuala Jelai 2) Jambi 3) Balai Riang
42.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Angrek	Gorontalo Utara, Gorontalo	1) Tolinggula 2) Monano 3) Sumalata 4) Bolontio 5) Biao
43.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Toli-Toli	Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Laulalang
44.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	-

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
45.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Nunukan	Nunukan, Kalimantan Timur	1) Sebuku 2) Sebakis 3) Semenggaris
46.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Banda Naira	Maluku Tengah, Maluku	Kumber
47.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke	Merauke, Papua	1) Kumbe 2) Bian 3) Wanam 4) Erambu 5) Semangga 6) Tanah Miring
48.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Manokwari	Manokwari, Papua Barat	1) Maruni 2) Sowi Marmpa 3) Saukorem 4) Kaironi
49.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Fak-Fak	Fakfak, Papua Barat	1) Karas 2) Weri

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto